

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan organisasi sektor publik di Indonesia kini dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang masyarakat/negara.

Laporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini yang telah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana laporan keuangan tersebut harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang artinya pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak-pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain, masyarakat, para

wakil rakyat, Lembaga pengawas, Lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, pers, investor, kreditor, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai, juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Nasution juga menyatakan bahwa permasalahan yang ditemukan antara lain terkait ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah dengan boros yang tidak jelas keperluannya. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022 memuat ringkasan dari 771 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 682 LHP Keuangan, 41 LHP Kinerja, dan 48 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan sebesar RP18,37 triliun. Realita yang terjadi saat ini terus memperlihatkan adanya kesenjangan antara kompetensi pegawai dengan kompetensi yang ditentukan sebagai syarat tugas pokok. Contohnya adalah, pada saat ini hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 memiliki rata-rata 65,6 yang mana nilai tersebut dibawah rerata nilai nasional 72,4. Adapun faktor internal yang mempengaruhi yaitu, risiko suap atau gratifikasi 26%, risiko *trading in fluence* 28%, dan risiko pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 30%. Kemudian, risiko penyalahgunaan fasilitas kantor 51%, risiko nepotisme dalam pengelolaan SDM 34%, risiko jual beli jabatan 21% dan risiko penyalahgunaan perjalanan dinas 28 persen (IHPS BPK, 2022). Masih banyak permasalahan yang terjadi dimana staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan masih kurang memiliki keterampilan dalam bidang

akuntansi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung 2 tahun terakhir mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan Determinan Kualitas Laporan Keuangan diantaranya dilakukan oleh (Zulkarnain dan Ningrum, 2020) yang juga telah membuktikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mustafa dan Yuliana, 2019) menghasilkan hipotesis bahwa kompetensi standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Dan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2017) membuktikan bahwa kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah maka akan menyebabkan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dihasilkan.

Perbedaan hasil penelitian dan masih banyaknya organisasi pemerintahan yang belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pendorong dan daya Tarik tersendiri bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani yaitu tidak adanya variabel kompetensi staf, hal ini dikarenakan variabel kompetensi staf memiliki banyak kesamaan pada indikator variabel kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil judul **“DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti telah menetapkan beberapa ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
2. Subjek dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia, serta Laporan Keuangan Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
3. Ruang lingkup penelitian ini adalah OPD Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
3. Apakah terdapat pengaruh dengan adanya pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini mencakup:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh atas penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh atas pengendalian intern terhadap kualitas keuangan pemerintah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu;
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti hal yang sama;

3. Memberikan masukan bagi pemerintah kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan implementasi pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, dan penggunaan teknologi komputer.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori yang mendukung penelitian ini, seperti penelitian terdahulu, kerangka pikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai definisi pengukuran variabel populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian, dan saran yang bermanfaat baik bagi pihak penyedia informasi, juga bagi peneliti yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN